

10/528

0000198

788

00000

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/528

NOMOR KLAS :

A S A I : B / 9 / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

KEP-057/J.A/6/1981

NO. :

Tentang

PENETAPAN SEWA RUMAH DINAS

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tarif/besarnya sewa rumah Negara/dinas Kejaksaan Agung R.I. diwilayah D.K.I. Jakarta Raya.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No.32/M Tahun 1981, tanggal 9 Pebruari 1981;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 14A tahun 1980, pasal 6 ayat 3; tentang keharusan dikenakan pembayaran sewa terhadap penghuni rumah dinas/rumah Negara.
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No.SE-1.16/DJA/VII.3/3/77, tanggal 17 Maret 1977, tentang Penetapan sementara tarif tertinggi sewa rumah Negeri berhubung dengan berlakunya P.G.P.N. 1977 ;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SEWA RUMAH DINAS.

- PERTAMA : Sewa rumah dinas terletak Jl. Brawijaya No. 9, Jl. Brawijaya No. 11, Jl. Prapanca No. 37 dan Jl. Setiabudi No.II/2 Jakarta Selatan ditetapkan masing-masing sebesar Rp.12.750,- sebulan.
- KEDUA : Sewa rumah dinas Kompleks Kejaksaan Agung di Tebet Jakarta Selatan ditetapkan untuk masing-masing rumah sebesar Rp. 4.200,- sebulan.
- KETIGA : Sewa rumah Jabatan dinas Kejaksaan Agung R.I. Lebak Bulus Jakarta Selatan type D ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 3.600,- sebulan.
- KEEMPAT : Sewa rumah dinas Kejaksaan Agung R.I. di Mess Pejompongan Jakarta Pusat ditetapkan masing-masing sebesar Rp.3.600,- sebulan.
- KELIMA : Pembayaran sewa rumah tersebut masing-masing dilaksanakan dengan memotong gaji oleh Bendaharawan gaji setiap bulan.
- KEENAM : Pungutan sewa rumah dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 12 Juni 1981.



JAKSA AGUNG R.I.

SMAIL SALEH, SH.

TEMBUSAN :

1. Para JAKSA AGUNG MUDA.
2. Para Penghuni Rumah Dinas Kejaksaan Agung di wilayah D.K.I. Jakarta Raya.
3. Koordinator Staf Ahli.
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan.
5. Arsip.